DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis ISSN. 2721-4907
Volume 7, Nomor 2, Oktober 2026

PARTISIPASI WAJIB PAJAK PBB-P2 DAN KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH: PERSPEKTIF MANAJEMEN PENDAPATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PBB-P2 Taxpayer Participation and Local Tax Revenue Performance: A Revenue Management Perspective in Sidenreng Rappang Regency

Ismayanti Idris[1], Irwan[2], Sariana Damis[3], Andi Ar[4]
Email: ismayantiidris5@gmail.com[1], idrusirwan@yahoo.com[2], sarianadamis@gmail.com[3] andi.armj@gmail.com[4]
[1,2,3]Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap kinerja pendapatan pajak daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2022–2025. Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 975.011 individu. Sampel penelitian sebanyak 100 responden ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan teknik accidental sampling. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi wajib pajak PBB-P2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pendapatan pajak daerah. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,536, yang berarti variasi kinerja pendapatan pajak daerah dapat dijelaskan oleh tingkat partisipasi wajib pajak PBB-P2 sebesar 53,6%, sedangkan sisanya sebesar 46,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa peningkatan kesadaran, kepatuhan, ketepatan waktu pembayaran, dan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak merupakan strategi penting bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci: Wajib Pajak, PBB-P2, Kinerja, Pendapatan Daerah, Perspektif Manajemen

Abstract

This study aims to analyze the effect of taxpayer participation in Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) on the performance of regional tax revenue in Sidenreng Rappang Regency during the 2022–2025 period. The study population comprises all PBB-P2 taxpayers in the regency, totaling 975,011 individuals. A sample of 100 respondents was determined using the Slovin formula with an accidental sampling technique. Data analysis was conducted using simple linear regression with the assistance of SPSS version 23. The results indicate that the level of taxpayer participation in PBB-P2 has a positive and statistically significant effect on regional tax revenue performance. The coefficient of determination (R^2) is 0.536, indicating that 53.6% of the variation in regional tax revenue performance can be explained by the level of PBB-P2 taxpayer participation, while the remaining 46.4% is influenced by other factors beyond the scope of this study. From a practical standpoint, these findings suggest that enhancing taxpayer awareness, compliance, timeliness of payment, and willingness to pay taxes are essential strategies for local governments to optimize regional tax revenue and strengthen fiscal independence.

Keywords: Taxpayer, PBB-P2, Performance, Regional Tax Revenue, Management perspective.

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama penerimaan pemerintah daerah yang berperan penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah (Mardiasmo, 2019). Dalam konteks desentralisasi fiskal, peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi perhatian utama seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan (Halim, 2020). Di Indonesia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah, dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki nilai strategis karena pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Optimalisasi penerimaan PBB-P2 sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi wajib pajak yang tercermin melalui kesadaran, ketepatan waktu pembayaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2019).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 sangat bergantung pada keterlibatan aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Siahaan, 2020; Damis & Su'un, 2021). Namun demikian, kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal apabila tidak diikuti oleh peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat (Nurwani et al., 2021). Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa meskipun mekanisme administrasi pemungutan PBB-P2 telah berjalan relatif baik, rendahnya kepatuhan dan keterlambatan pembayaran masih menjadi kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah (Harun & Tenriwaru, 2021). Temuan tersebut diperkuat oleh berbagai studi yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 menjadi faktor yang memengaruhi pencapaian penerimaan pajak daerah (Wahab et al., 2024).

Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dan inkonsistensi dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada mekanisme pemungutan, kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, atau kepatuhan wajib pajak secara parsial, sehingga kajian mengenai pengaruh tingkat partisipasi wajib pajak secara komprehensif terhadap kinerja pendapatan pajak daerah masih relatif terbatas (Kirchler et al., 2008). Kedua, terdapat inkonsistensi hasil penelitian, di mana beberapa studi menemukan pengaruh positif dan signifikan penerimaan PBB-P2 terhadap PAD, sementara studi lain justru menunjukkan hasil yang tidak signifikan (Khadijah et al., 2024). Ketiga, penelitian yang secara spesifik mengkaji partisipasi wajib pajak yang meliputi dimensi kesadaran, kepatuhan, ketepatan waktu, dan kemauan membayar pajak sebagai satu kesatuan variabel prediktor terhadap kinerja pendapatan pajak daerah belum banyak dilakukan, khususnya di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Ajzen, 1991).

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi penerimaan PBB-P2 yang cukup besar, tetapi realisasi penerimaan belum sepenuhnya mencerminkan potensi tersebut. Data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa meskipun jumlah objek pajak terus meningkat selama periode 2022–2025, persentase realisasi penerimaan PBB-P2 menunjukkan kecenderungan menurun (Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah objek pajak belum diikuti oleh peningkatan partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat kesenjangan antara kondisi yang diharapkan secara teoritis dan realitas di lapangan: secara teoritis, peningkatan partisipasi wajib pajak seharusnya berimplikasi terhadap peningkatan kinerja pendapatan pajak daerah. Namun, berbagai upaya pemerintah daerah, seperti sosialisasi dan intensifikasi pemungutan pajak, belum mampu mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah tingkat partisipasi wajib pajak PBB-P2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pendapatan pajak daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2022–2025?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap kinerja pendapatan pajak daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2022–2025. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur mengenai hubungan partisipasi wajib pajak dengan kinerja pendapatan pajak daerah, serta memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap kinerja pendapatan pajak daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada ketersediaan data yang relevan mengenai partisipasi wajib pajak PBB-P2 dan kinerja pendapatan pajak daerah selama periode 2022–2025.

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 975.011 wajib pajak. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin (Umar, 2019) dengan tingkat kesalahan (e) sebesar 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel minimal sebanyak 100 responden. Perhitungan dilakukan sebagai berikut:

$$n = N / (1 + N \cdot e^2)$$
$$= 975.011 / (1 + 975.011 \times 0{,}1^2)$$
$$= 99{,}99 \approx 100 \text{ responden.}$$

Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling melalui pendekatan accidental sampling. Teknik ini dipilih karena memudahkan peneliti menjangkau responden yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, dan akses penelitian. Untuk memitigasi potensi bias yang melekat pada teknik accidental sampling, peneliti memastikan pengambilan data dilakukan pada lokasi dan waktu yang bervariasi, meliputi kantor Bapenda, kantor kecamatan, serta tempat pembayaran pajak di 8 kecamatan yang berbeda, sehingga sampel dapat merepresentasikan keragaman karakteristik wajib pajak.

Penelitian menggunakan dua variabel, yaitu tingkat partisipasi wajib pajak PBB-P2 sebagai variabel independen (X) dan kinerja pendapatan pajak daerah sebagai variabel dependen (Y). Variabel partisipasi wajib pajak diukur melalui empat indikator, yaitu: (1) kesadaran wajib pajak, meliputi pemahaman tentang fungsi dan manfaat pajak; (2) kepatuhan wajib pajak, mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan; (3) ketepatan waktu pembayaran, yaitu disiplin dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo; dan (4) kemauan membayar pajak, yaitu kesediaan secara sukarela untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sementara itu, variabel kinerja pendapatan pajak daerah diukur berdasarkan indikator yang mengacu pada *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), meliputi: (1) sikap terhadap perilaku, yaitu penilaian wajib pajak terhadap pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah. (2) norma subjektif, yaitu pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan perpajakan, dan (3) kontrol perilaku, yaitu persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan kemampuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2 menggunakan skala Likert lima tingkat (Sugiyono, 2019) (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju). Data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, serta dokumen resmi pemerintah daerah yang berkaitan dengan penerimaan PBB-P2. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, penyebaran kuesioner, observasi terstruktur, dan penelusuran dokumen pendukung dari sumber resmi.

Analisis data dilakukan menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 23. Tahapan analisis meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear sederhana, uji parsial (uji t), serta uji koefisien determinasi (R^2). Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh tingkat partisipasi wajib pajak PBB-P2 terhadap kinerja pendapatan pajak daerah dengan persamaan:

$$Y = a + bX$$

dengan Y adalah kinerja pendapatan pajak daerah, X adalah tingkat partisipasi wajib pajak PBB-P2, a merupakan konstanta, dan b adalah koefisien regresi. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), sedangkan koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengonfirmasi keabsahan instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Sebuah kuesioner dinyatakan valid apabila setiap butir pernyataan mampu mengukur secara tepat aspek yang menjadi objek pengukuran.

Tabel 1. Uji Validitas

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1	0,824	0,195	Valid
X2	0,850	0,195	Valid
X3	0,711	0,195	Valid
X4	0,808	0,195	Valid
X5	0,820	0,195	Valid
X6	0,832	0,195	Valid
X7	0,814	0,195	Valid
X8	0,798	0,195	Valid
Y1	0,844	0,195	Valid
Y2	0,827	0,195	Valid
Y3	0,809	0,195	Valid
Y4	0,811	0,195	Valid
Y5	0,762	0,195	Valid
Y6	0,851	0,195	Valid

Sumber: Olah Data SPSS 23 (2026)

Berdasarkan Tabel 1, setiap item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Dalam penelitian ini, nilai r tabel yang digunakan yaitu 0,195 dan nilai signifikansi < 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada kedua variabel memiliki nilai r hitung > 0,195 dengan signifikansi < 0,05, sehingga seluruh item dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi kuesioner sebagai indikator dari suatu variabel atau konstruk.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach' Alpha	Jumlah Item Instrumen	Keterangan
X	0,924	8	Reliabel
Y	0,900	6	Reliabel

Sumber: Olah Data SPSS 23 (2026)

Berdasarkan Tabel 2, setiap variabel dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai Cronbach's Alpha pada setiap variabel yang menunjukkan nilai > 0,6, yang mengindikasikan konsistensi internal instrumen yang memadai.

Uji Normalitas

Uji normalitas ditujukan untuk mendeteksi apakah komponen residual dalam model regresi menyebar secara normal. Terpenuhinya asumsi normalitas bersifat fundamental karena pengujian statistik melalui uji t maupun uji F didasarkan pada premis bahwa nilai residual harus berdistribusi normal.

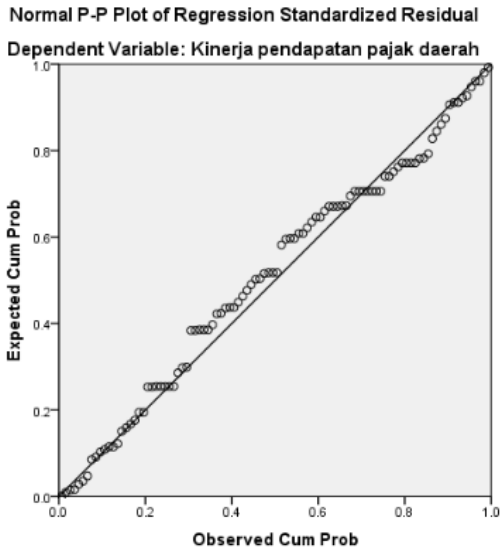
Tabel 3. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.69830648
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.066
	Negative	-.083
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.083
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.69830648
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.066
	Negative	-.083
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.083

Sumber: Olah Data SPSS 23 (2026)

Berdasarkan Tabel 3, dengan N = 100 data, diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov test sebesar 0,083 dan nilai signifikansi sebesar 0,083 (> 0,05), yang mengindikasikan bahwa sebaran data telah memenuhi asumsi normalitas.

Selain uji statistik Kolmogorov-Smirnov, penilaian normalitas data juga dapat diidentifikasi melalui pendekatan berbasis grafik. Dalam analisis visual, jika komponen residual model berdistribusi normal, maka sebaran data aktual akan bergerak selaras dan melekat di sepanjang garis referensi teoretis pada grafik Normal P-P Plot.



Gambar 1. Normal P-Plot of Regression Standardized Residual

Gambar 1 menunjukkan bahwa persebaran titik residual berada di area sekitar garis diagonal serta bergerak selaras mengikuti arah garis tersebut. Hasil pengamatan visual ini menegaskan bahwa sebaran residual mendekati distribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi ketidakseragaman varians residual pada seluruh observasi dalam model regresi. Ketepatan dan efisiensi model regresi linear sederhana dapat terganggu apabila gejala heteroskedastisitas muncul.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.982	1.046		.936	.351
Tingkat Partisipasi PBB-P2	.034	.032	.108	1.079	.283

Sumber: Olah Data SPSS 23 (2026)

Dari hasil analisis menggunakan Uji Glejser, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel independen sebesar 0,283. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hubungan linear antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini bertujuan untuk memprediksi perubahan nilai variabel dependen akibat perubahan variabel independen serta mengetahui arah hubungan antara kedua variabel.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana dan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.674	1.691		3.946	.000
Tingkat Partisipasi PBB-P2	.546	.051	.732	10.648	.000

Sumber: Olah Data SPSS 23 (2026)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada Tabel 5, nilai konstanta sebesar 6,674 menunjukkan bahwa apabila tingkat partisipasi PBB-P2 (X) bernilai 0, maka kinerja pendapatan pajak daerah (Y) sebesar 6,674 satuan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,636 mengonfirmasi adanya hubungan positif antara tingkat partisipasi PBB-P2 dengan kinerja pendapatan pajak daerah. Hal ini berarti setiap peningkatan tingkat partisipasi PBB-P2 sebesar 1 satuan, maka kinerja pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 0,636 satuan, dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. Secara praktis, koefisien ini menunjukkan bahwa partisipasi wajib pajak memberikan kontribusi substantif terhadap kinerja pendapatan pajak daerah, di mana peningkatan partisipasi wajib pajak melalui kesadaran, kepatuhan, ketepatan waktu, dan kemauan membayar pajak secara nyata dapat meningkatkan capaian penerimaan pajak daerah.

Hasil uji t parsial pada Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi PBB-P2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka secara parsial variabel tingkat partisipasi PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendapatan pajak daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien berada pada rentang antara nol dan satu, di mana nilai yang mendekati satu mengindikasikan kemampuan yang kuat.

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.732	.536	.532	2.712

Sumber: Olah Data SPSS 23 (2026)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,536. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi wajib pajak PBB-P2 mampu menjelaskan variasi kinerja pendapatan pajak daerah sebesar 53,6%. Sementara itu, sisanya sebesar 46,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Berdasarkan kajian literatur, faktor-faktor tersebut antara lain penegakan sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2019), kualitas pelayanan aparatur pajak (Parasuraman et al., 1988), pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pembayaran (Damis & Harun, 2024), tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Kirchler et al., 2008), serta kondisi sosial ekonomi masyarakat (Siahaan, 2020).

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Partisipasi Wajib Pajak PBB-P2 terhadap Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pendapatan pajak daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Semakin tinggi tingkat partisipasi wajib pajak, maka semakin baik pula kinerja pendapatan pajak daerah yang dicapai. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban

perpajakan, ketepatan waktu pembayaran, dan kemauan membayar pajak secara sukarela menjadi faktor yang berkontribusi untuk mendukung pendapatan pajak daerah.

Dalam pengelolaan pajak daerah, partisipasi wajib pajak sangat penting karena keberhasilan penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh tingkat kesediaan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keterlibatan wajib pajak yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memahami bahwa pajak berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi wajib pajak dapat membantu pemerintah daerah mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Temuan ini didukung oleh penelitian Damis dan Su'un (2021) serta Harun dan Tenriwaru (2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan membayar pajak daerah dipengaruhi oleh faktor perilaku wajib pajak, sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan maka semakin besar pula peluang peningkatan penerimaan pajak daerah. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pentingnya perilaku wajib pajak dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada tingkat partisipasi wajib pajak yang mencakup kesadaran, kepatuhan, ketepatan waktu pembayaran, dan kemauan membayar pajak.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui *Slippery Slope Framework* (Kirchler et al., 2008) yang menegaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu kepercayaan terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan serta kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan peraturan perpajakan. Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah daerah akan mendorong keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Di sisi lain, pelaksanaan pengawasan yang efektif juga berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah dan memperkuat kinerja pendapatan daerah secara keseluruhan.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan *Theory of Planned Behavior*/TPB (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga komponen utama: sikap terhadap suatu tindakan, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dukungan dari lingkungan sosial, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah daerah, turut berkontribusi dalam memperkuat niat tersebut. Tersedianya kemudahan dalam proses pembayaran serta kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai kemampuan pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi dalam pembayaran PBB-P2.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Andi AR (2022) dan Idrus (2022) yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh sikap wajib pajak, motivasi, serta dukungan lingkungan sosial. Keterlibatan masyarakat memiliki peranan penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Adapun perbedaannya, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya meneliti faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian ini menganalisis dampak partisipasi wajib pajak terhadap kinerja pendapatan pajak daerah.

Penelitian ini juga selaras dengan temuan Nurwani et al. (2021) dan Khadijah et al. (2024) yang menegaskan bahwa PBB-P2 merupakan salah satu sumber penerimaan yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan studi Yanti dan Damis (2022) yang menyimpulkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbedaan temuan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan lokasi penelitian, karakteristik responden, kondisi ekonomi daerah, serta variabel yang digunakan.

Dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, partisipasi wajib pajak memiliki posisi yang strategis mengingat PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi cukup besar. Peningkatan jumlah objek pajak dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peluang yang semakin besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila didukung oleh tingkat partisipasi wajib pajak yang tinggi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, seperti pelaksanaan sosialisasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan, pemutakhiran data objek pajak, serta pengembangan sistem pembayaran berbasis elektronik, perlu terus ditingkatkan guna mendorong partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tingkat partisipasi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pendapatan pajak daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Semakin tinggi tingkat partisipasi wajib pajak yang tercermin melalui kesadaran, kepatuhan, ketepatan waktu pembayaran, dan kemauan membayar pajak, maka semakin meningkat pula kinerja pendapatan pajak daerah. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,536 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi wajib pajak PBB-P2 mampu menjelaskan 53,6% variasi kinerja pendapatan pajak daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi wajib pajak merupakan faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena pengambilan sampel hanya mencakup 8 dari 11 kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan teknik *accidental sampling*, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan pada seluruh populasi wajib pajak di daerah tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian hingga seluruh kecamatan dengan menggunakan teknik probability sampling, seperti *stratified random sampling*, agar menghasilkan tingkat generalisasi yang lebih baik. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel moderating seperti kualitas pelayanan aparatur dan penegakan sanksi perpajakan, atau variabel intervening seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengaruh partisipasi wajib pajak terhadap kinerja pendapatan pajak daerah. Penggunaan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) juga direkomendasikan untuk menggali perspektif wajib pajak secara lebih mendalam melalui wawancara atau *focus group discussion*.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Andi AR. (2022). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Kabupaten Sidenreng Rappang. DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 3(1), 45–56.

Damis, S., & Harun, H. (2024). Peningkatan pendapatan usaha UMKM Asoka Desa Tanra Tuo Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang melalui digitalisasi bisnis. Economics and Digital Business Review, 5(1).

Damis, S., Harun, H., & Arodhiskara, Y. (2025). The impact of environmental uncertainty and accounting information systems on managerial performance of micro, small, and medium enterprises in Parepare City. IECON, 3(2), 1843–1851.

Damis, S., & Su'un, M. (2021). Pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada pengusaha muda di Kota Parepare dimoderasi oleh nilai budaya Bugis. Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 4(1), 28–39.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2020). Akuntansi keuangan daerah (Edisi 5). Salemba Empat.

Harun, H., & Tenriwaru, T. (2021). Nilai budaya memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penanggulangan fraud dalam pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare. Akuisisi, 17(2), 131–140.

Harun, H., Nurain, N., & Nurwani, N. (2025). Integration of digital payment literacy and accounting in promoting the growth of MSMEs. Journal of Accounting Science, 9(2), 324–351.

Idrus, I. (2022). Good governance: Kajian empiris budaya organisasi, kompetensi, motivasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Penerbit Widina.

Khadijah, N., Rahma, R., & Harun, H. (2024). Optimalisasi dana desa terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Journal AK-99, 4(1), 118–127.

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. Journal of Economic Psychology, 29(2), 210–225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004

Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi revisi 2019). Penerbit Andi.

Nurwani, M., Damis, S., & Wahyuni, S. (2021). Analisis efektivitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare. Journal AK-99, 1(2), 81–85.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12–40.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.

Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan kasus (Edisi 11). Salemba Empat.

Siahaan, M. P. (2020). Pajak daerah dan retribusi daerah (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta.

Umar, H. (2019). Metode riset bisnis. Gramedia Pustaka Utama.

Wahab, A., Damis, S., Mariana, L., Harun, H., & Marsuni, N. S. (2024). Evaluation of the effectiveness of carbon tax as a tool for controlling air pollution in Indonesia: Challenges and opportunities. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 7(2), 255–263.

Yanti, D. D., & Damis, S. (2022). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan pendapatan desa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Journal AK-99, 2(1), 54–60.